



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 71/M.PPN/HK/05/2017
TENTANG
DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2017**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2017.**
- PERTAMA** : Membentuk Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2017 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan dibahas oleh Biro Hukum dengan unit kerja terkait untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- KETIGA** : Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diusulkan di luar Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dibahas oleh Biro Hukum dan unit kerja pengusul untuk mendapatkan persetujuan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 71/M.PPN/HK/05/2017
TANGGAL 24 MEI 2017

DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2017

NO	JUDUL	PEMRAKARSA
1	Pedoman Umum Pengentasan Permukiman Kumuh Nasional	Direktorat Perkotaan, Pemukiman dan Perumahan
2	Pembangunan Kota Baru	Direktorat Perkotaan, Pemukiman dan Perumahan
3	Koordinasi Penguatan Kelembagaan Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia (JEJAKMU)	Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
4	Pedoman Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
5	Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah 2015-2019	Direktorat Transportasi
6	Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Proyek yang dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Direktorat Perencanaan, Pengembangan Pendanaan Pembangunan
7	RAN Pangan dan Gizi Tahun 2015 - 2019	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
8	Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
9	Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah	Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun
10	Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDG's)	Direktorat Kehutanan
11	Pedoman Penyusunan, Penelaahan dan Revisi Renja KL	Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan
12	Pedoman Penyusunan RKP	1. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana; 2. Direktorat Pengembangan Wilayah.

13	Pedoman Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Proyek Prioritas	1. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan. 2. Biro Hukum
14	Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan PLT	Biro Hukum
15	Perubahan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas	Biro Hukum
16	Pedoman Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden di Depan Sidang Bersama DPR dan DPD	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
17	Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian PPN/Bappenas	Biro Sumber Daya Manusia
18	Pedoman Penyusunan Peta Jabatan, Beban Kerja, dan Perhitungan Kebutuhan Pegawai Unit Kerja	Biro Sumber Daya Manusia
19	Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Biro Sumber Daya Manusia
20	Pedoman Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia
21	Pedoman Kebijakan Pengembangan SDM Kementerian PPN/Bappenas (HCDF)	Biro Sumber Daya Manusia
22	Pedoman LHKPN bagi Pejabat	Biro Sumber Daya Manusia
23	Pedoman Kebijakan Pola Karir Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas	Biro Sumber Daya Manusia
24	Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja JFP di Kementerian PPN/Bappenas	Biro Sumber Daya Manusia
25	Pengelolaan Barang Milik Negara	Biro Umum
26	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian PPN/Bappenas	Biro Umum
27	Penanganan dan Pencegahan Konflik Kepentingan	Inspektur Bidang Administrasi Umum
28	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inpasing JFP	Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana
29	Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi di Kementerian PPN/Bappenas	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
30	Pedoman Pelaksanaan Satu Data Indonesia	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati